



**DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2016 - 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dengan baik. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016 ini atas dasar penetapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya yang telah disahkan pada 18 Agustus 2016. Rencana Strategis ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Dinas Pendidikan. Apabila dalam penyusunan Rencana Strategis ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Strategis ini.

Akhir kata kami berharap mudah-mudahan Rencana Strategis ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya.

Surabaya, 16 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya



Dr. Ikhsan, S. Psi. MM
Pembina Utama Muda
NIP.19690809 199501 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i		
DAFTAR ISI	ii		
DAFTAR GAMBAR	iv		
DAFTAR TABEL	vi		
Bab I	PENDAHULUAN		
	I.1.	Latar Belakang	1
	I.2.	Landasan Hukum	12
	I.3.	Maksud dan Tujuan	13
	I.4.	Sistematika Penulisan	14
Bab II	ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA	16	
	II.1	Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	16
	II.2.	Sumber Daya Dinas Pendidikan	24
	II.3	Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	27
	II.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan	40
Bab III	Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43	
	III.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan	43
	III.2.	Perumusan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46
	III.3.	Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	47
	III.4.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota	53
	III.5..	Perumusan Isu-isu Strategis	58

Bab IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	65
	IV.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan	65
	IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	67
	IV.3. Strategi dan Kebijakan	69
Bab V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	76
	V.1. Keterkaitan Program dengan Visi Misi Dinas Pendidikan	78
	V.2. Keterhubungan Renstra Dinas Pendidikan dengan RPJMD	79
	V.3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Surabaya	81
Bab VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	83
Bab VII	PENUTUP	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rancangan Renja SKPD	3
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	5
Gambar 1.3	Hubungan Antara Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA)	6
Gambar 1.4	Hubungan Antara Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014-2019	9
Gambar 1.5	Hubungan Antara Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	11
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan antara Visi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Visi Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2015-2019	7
Tabel 1.2	Hubungan antara Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019	8
Tabel 1.3	Hubungan antara Visi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Visi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	10
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Fungsi	24
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Tabel 2.3	Jumlah Lembaga Yang Dikelola Dinas Pendidikan	25
Tabel 2.4	UPTD Dinas Pendidikan	25
Tabel 2.5	APBD Yang Dikelola Dinas Pendidikan Kota Surabaya	26
Tabel 2.6	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya	27
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan	32
Tabel 2.8	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	40
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan	45
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan	46
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	47

Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	53
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	56
Tabel 3.6	Nilai Kriteria Skala	58
Tabel 4.1	Perumusan Perwujudan Visi	65
Tabel 4.2	Perumusan Penjelasan Visi	66
Tabel 4.3	Deployment Renstra Dinas Pendidikan dengan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	68
Tabel 5.1	Keterkaitan Program dengan Visi Misi Dinas Pendidikan	78
Tabel 5.2	Keterhubungan Renstra Dinas Pendidikan dengan RPJMD	80
Tabel 5.3	Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran	81
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan	83

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2016-2021



TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di bidang pendidikan diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan. Selain itu, perencanaan pembangunan di bidang pendidikan disusun untuk menjamin kualitas pendidikan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita. Sementara itu Nawacita meliputi, (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa- bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa;serta (9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pencermatan kembali, amanat konstitusi, Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Surabaya serta kondisi terkini menjadikan sinergi pembangunan pendidikan sebagai pilihan yang memiliki alasan kuat. Berpedoman pada itu, disusunlah Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-

2021. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian rencana strategis dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, rencana strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan di Kota Surabaya.

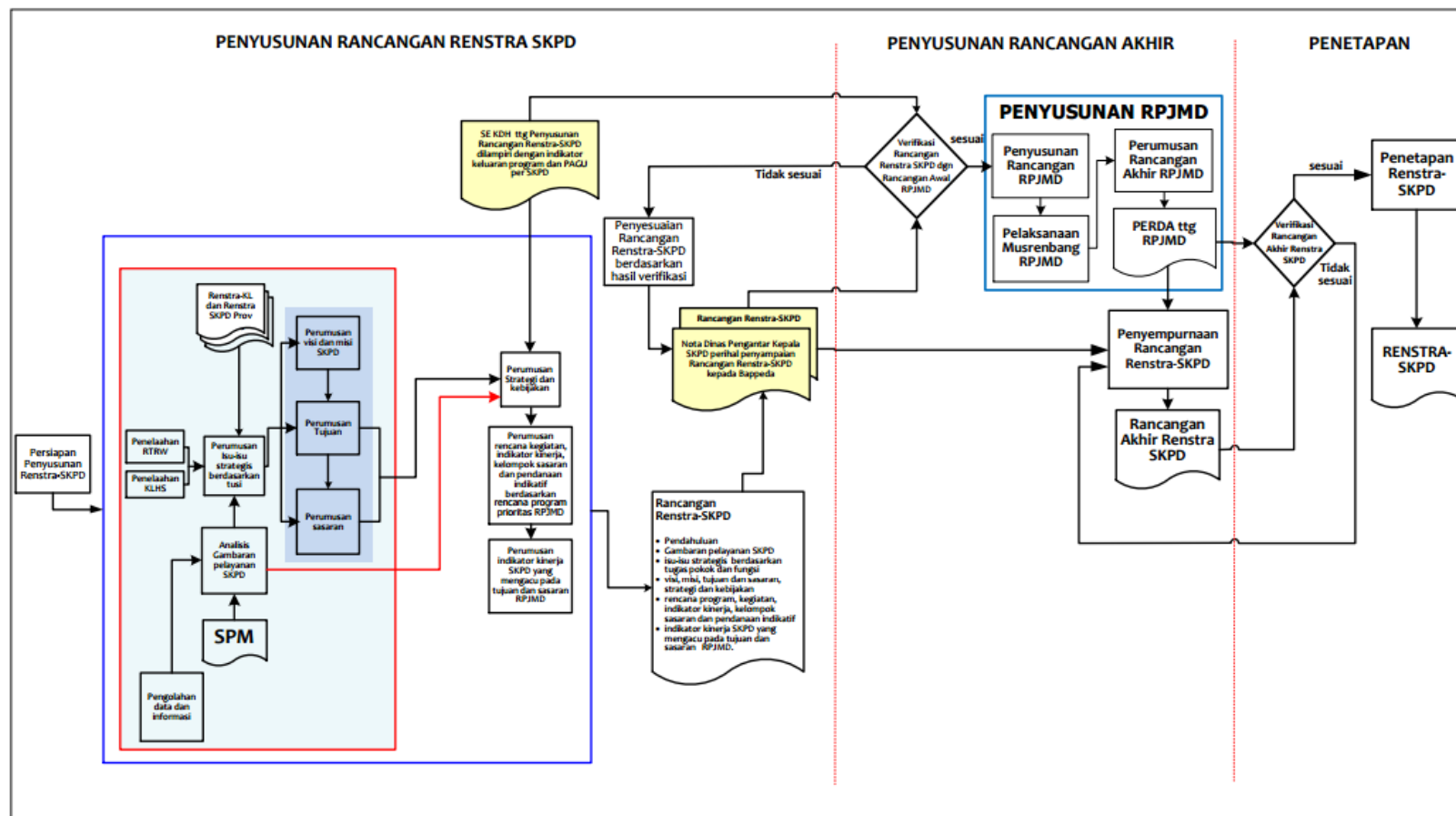
I.1.1. Pengertian Renstra Dinas Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dimaksud Rencana strategis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Pendidikan adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun.

I.1.2. Proses Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dimaksud Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra SKPD



Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD, meliputi:

- A. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra SKPD
- B. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
- C. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
- D. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD
- E. Penetapan Renstra SKPD

Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra SKPD, meliputi:

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
2. Orientasi Mengenai Renstra SKPD
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD
4. Pengumpulan Data dan Informasi

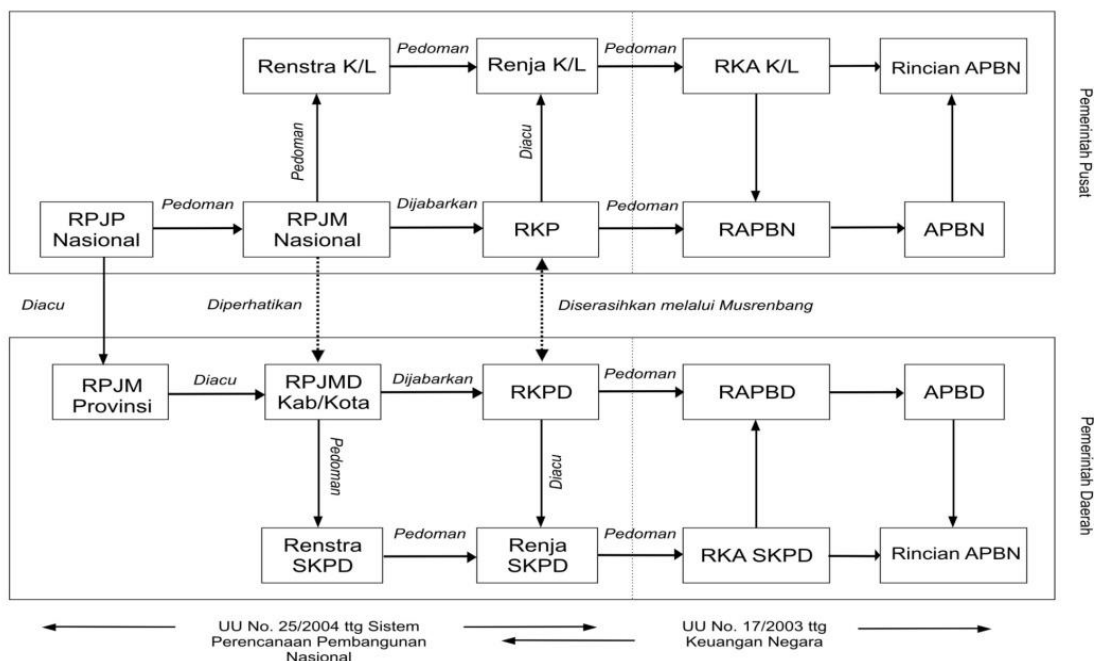
Sedangkan Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Tahap Perumusan Rancangan Renstra SKPD
2. Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD

I.1.3. Keterkaitan antara Renstra Dinas Pendidikan dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Gambaran tentang hubungan antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat sebagaimana ditunjukkan gambar 1.2

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



RPJP nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJM provinsi. Sedangkan RPJMD kota mengacu pada RPJM nasional. RPJMD kota dijabarkan oleh Badan Perencanaan Kota dalam bentuk RKPD. RKPD ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Dari Rancangan APBD akan disahkan untuk menjadi APBD. RPJMD kota ini menjadi pedoman dalam penyusunan renstra SKPD. Selanjutnya renstra akan dijadikan pedoman dalam penyusunan renja SKPD. Renja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA. RKA dan APBD akan dijabarkan dalam rincian APBD.

Keterkaitan Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2026-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:



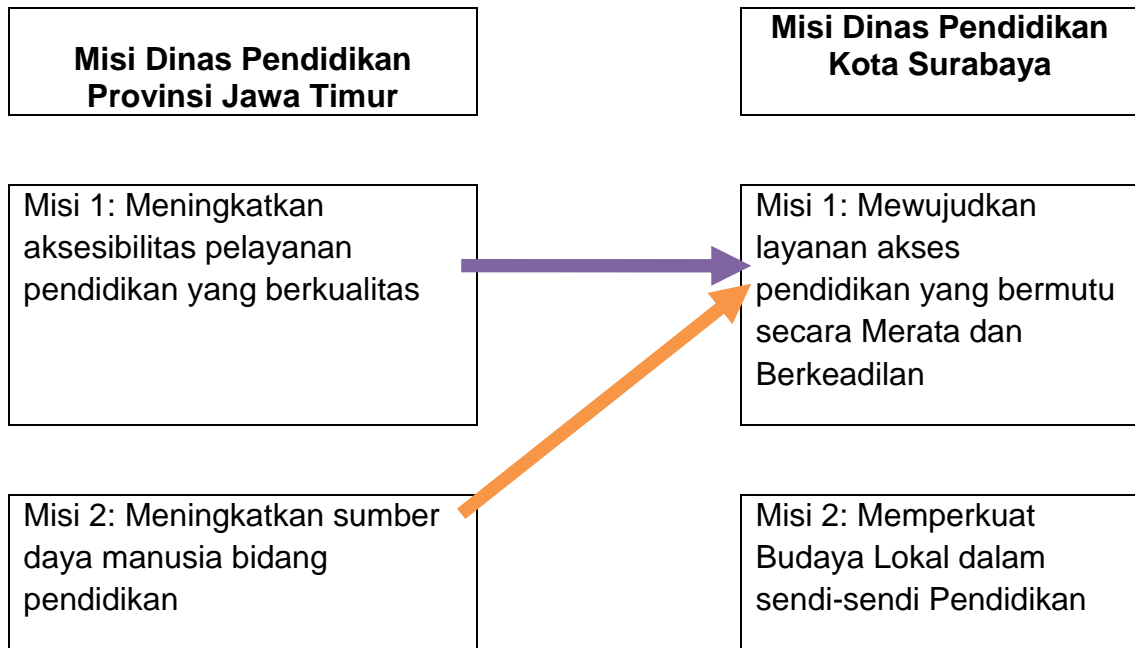
Gambar 1.3
Hubungan Antara Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA)

Tabel 1.1
Hubungan antara Visi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021
dengan Visi Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019	Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021		
	Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Menghasilkan Insan Indonesia <u>Cerdas</u> dan <u>Kompetitif</u> (Insan Kamil/Insan Paripurna)	Menjadikan Surabaya sebagai <u>Barometer</u> dan <u>Inspirator</u> Nasional	Barometer	Barometer yang dimaksud adalah pendidikan di Kota Surabaya dapat dijadikan standar penilaian ideal pendidikan yang ada di Indonesia.
		Inspirator	Inspirator yang dimaksud adalah bahwa pendidikan di Kota Surabaya dapat menjadi inspirasi pembangunan pendidikan di kota-kota lain di seluruh Indonesia.

Tabel 1.2
Hubungan antara Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021
dengan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

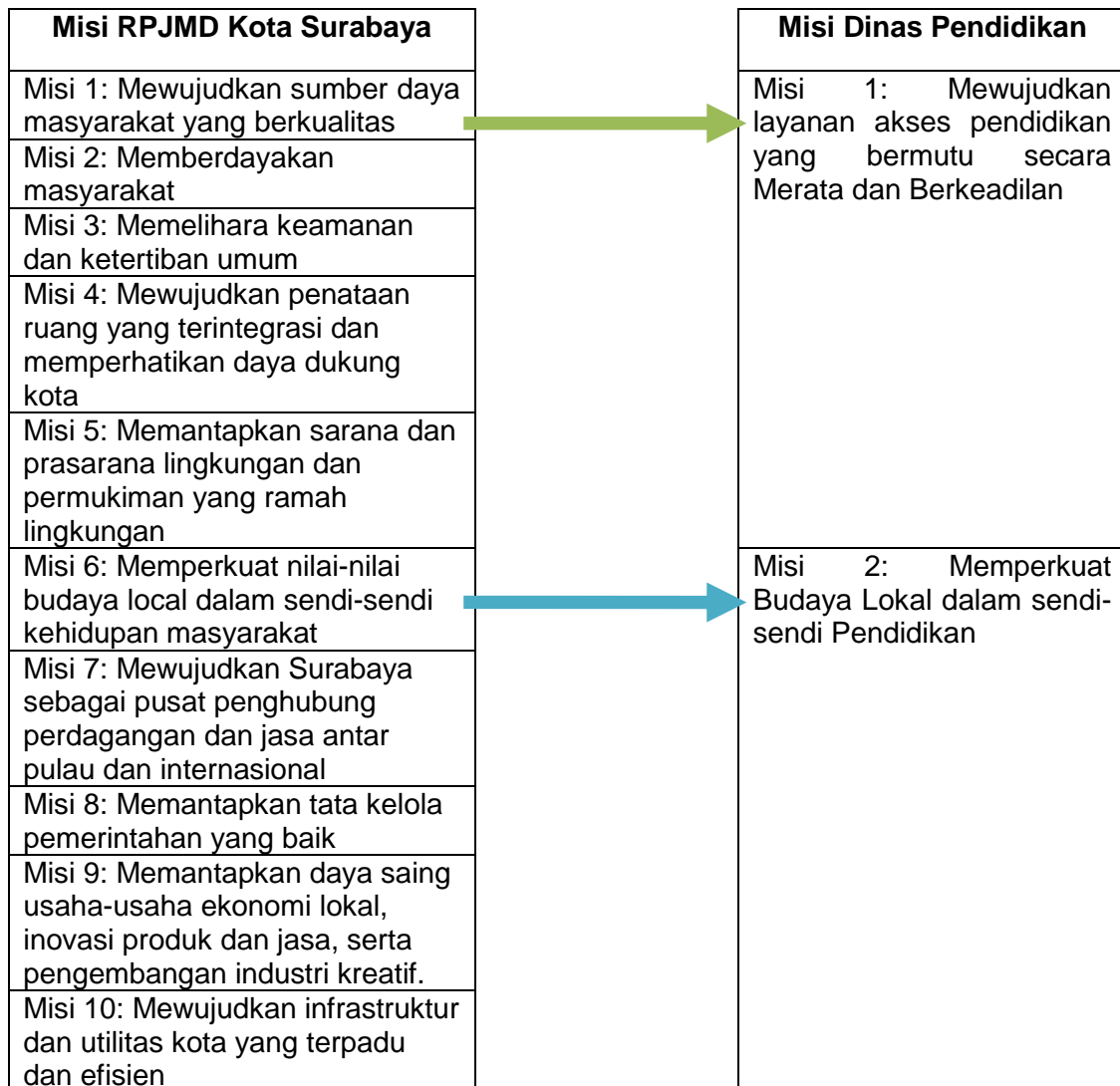
Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019	Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021		
	Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Visi : Terwujudnya Insan Yang Cerdas, Kreatif, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing Regional dan Global	Menjadikan Surabaya Sebagai <u>Barometer</u> Dan <u>Inspirator</u> Pendidikan Nasional	Barometer	Barometer yang dimaksud adalah pendidikan di Kota Surabaya dapat dijadikan standar penilaian ideal pendidikan yang ada di Indonesia.
		Inspirator	Inspirator yang dimaksud adalah bahwa pendidikan di Kota Surabaya dapat menjadi inspirasi pembangunan pendidikan di kota-kota lain di seluruh Indonesia.



Gambar 1.4
Hubungan Antara Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

Tabel 1.3
Hubungan antara Visi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021
dengan Visi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021		
	Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Visi : Surabaya Kota <u>Sentosa</u> Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi	Menjadikan Surabaya Sebagai <u>Barometer</u> Dan <u>Inspirator</u> Pendidikan Nasional	Barometer	Barometer yang dimaksud adalah pendidikan di Kota Surabaya dapat dijadikan standar penilaian ideal pendidikan yang ada di Indonesia.
		Inspirator	Inspirator yang dimaksud adalah bahwa pendidikan di Kota Surabaya dapat menjadi inspirasi pembangunan pendidikan di kota-kota lain di seluruh Indonesia.



Gambar 1.5
Hubungan Antara Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021
dengan Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Pendidikan

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 21 bahwa Dinas Pendidikan terdiri dari: bidang sekretariat; bidang pendidikan dasar; bidang pendidikan menengah dan kejuruan; bidang kesenian, olahraga dan pendidikan luar sekolah; bidang ketenagaan; UPTD; dan kelompok jabatan fungsional. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya pasal 56 bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi perencanaan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

Peraturan yang memayungi penganggaran:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota.

I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Kota Surabaya disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

I.3. Maksud Dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah:

1. Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan pendidikan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks;
2. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang;

3. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinas Pendidikan jangka menengah (5 tahun);
4. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Dinas Pendidikan, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun 2015 menjadi rencana strategis.

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra DINAS PENDIDIKAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan tahun 2016-2021.

Adapun tujuan disusunnya Renja 2016 adalah untuk:

1. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Dinas Pendidikan kota Surabaya dan berbagai komponen pembangunan berbasis pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
3. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan kota Surabaya;

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika rencana strategis Dinas Pendidikan sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - I.1. Latar Belakang
 - I.2. Landasan Hukum
 - I.3. Maksud dan Tujuan
 - I.4. Sistematika Penulisan
- II. Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 - II.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
 - II.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan
 - II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
 - II.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

- III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
 - III.2. Perumusan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - III.3. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - III.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota
 - III.5. Penentuan isu-isu strategis
- IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
 - IV.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan
 - IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
- V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
- VI. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd
- VII. Penutup

BAB II

ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

II.1.1. Tugas dan Fungsi DINAS PENDIDIKAN

II.1.1.a. Uraian Tugas

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya pasal 56 bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

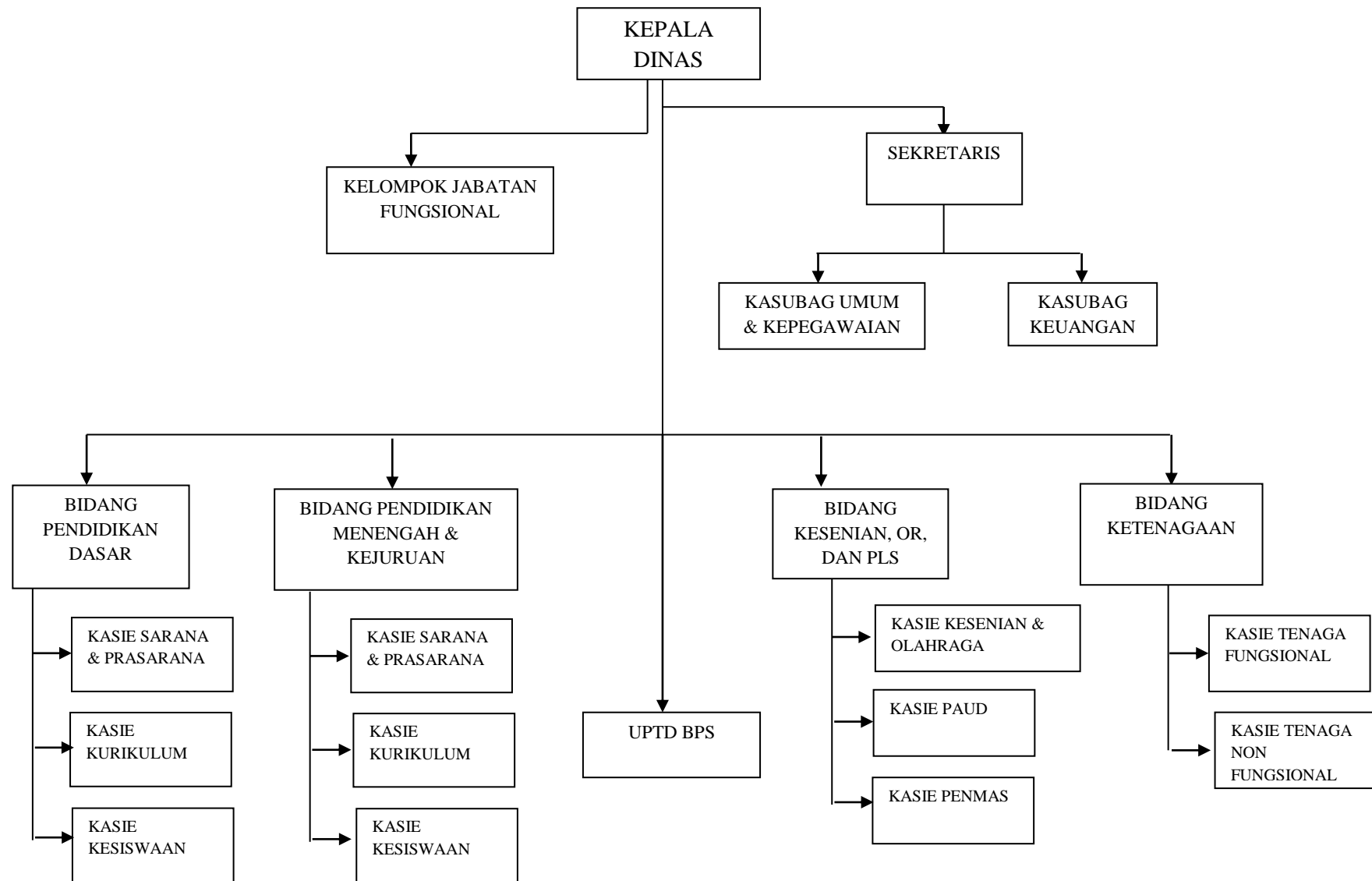
II.1.1.b. Uraian Fungsi

Fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana pasal 57 sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 56;
- d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

II.1.2. Struktur Organisasi DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan terdiri dari Bidang Sekretariat, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, Bidang Ketenagaan, serta Bidang Kesenian, Olahraga dan PLS. selain itu Dinas Pendidikan memiliki 5 UPTD dan Pengawas Dikdas dan Dikmen. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. pemrosesan administrasi pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal antara lain LBB, Paket Penyetaraan, Kursus Menjahit, Kursus Kecantikan sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK);
- h. pemrosesan administrasi pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah dan kejuruan berbasis keunggulan lokal;
- i. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.

Rincian tugas Bidang Pendidikan Dasar meliputi:

- a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. perencanaan operasional program pendidikan dasar sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota;
- d. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar;
- e. pemrosesan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar;
- f. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
- g. pemrosesan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal;

- h. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar;
- i. pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
- j. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota;
- k. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai kewenangannya;
- l. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
- n. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar;
- o. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
- p. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- q. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
- r. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- s. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- t. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar;
- u. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar;
- v. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota;
- w. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota;
- x. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan dasar skala kota;
- y. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar skala kota;

- z. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- aa. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
- bb. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
- cc. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota

Rincian tugas Bidang Pendidikan menengah meliputi:

- a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. perencanaan operasional program pendidikan menengah dan kejuruan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota;
- d. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan;
- e. pemrosesan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan menengah dan kejuruan;
- f. pemrosesan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan menengah dan kejuruan berbasis keunggulan lokal;
- g. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan menengah dan kejuruan;
- h. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota;
- i. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan sesuai kewenangannya;
- j. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- k. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur pendidikan menengah dan kejuruan;
- l. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan;

- m. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- n. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah dan kejuruan;
- o. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah dan kejuruan;
- p. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota;
- q. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota;
- r. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan menengah dan kejuruan skala kota;
- s. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan menengah dan kejuruan skala kota;
- t. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah dan kejuruan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- u. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
- v. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
- w. pelaksanaan evaluasi dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota.

Rincian tugas Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah meliputi:

- a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
- b. perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota;
- d. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal (kurikulum PAUD);

- e. pemrosesan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan/penyelenggara pendidikan nonformal (LBB, Paket Penyetaraan, Kursus Menjahit, Kursus Kecantikan);
- f. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota;
- g. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
- h. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- i. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini;
- k. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- l. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- m. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- n. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan nonformal;
- o. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota;
- p. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota;
- q. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal skala kota;
- r. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal skala kota;
- s. membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan nonformal;
- t. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;

- u. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
- v. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
- w. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota;
- x. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota, khususnya Pramuka di sekolah.

Rincian tugas Bidang ketenagaan meliputi:

- a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
- b. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
- c. pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
- d. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kota;
- e. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- f. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- g. rekomendasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

II.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di dinas, UPTD, maupun pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dibantu dengan pegawai kontrak yang terdiri dari admin, petugas keamanan dan petugas kebersihan.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Fungsi

Jumlah Pegawai	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu
Jumlah PNS	642	10.007

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS
SD	33
SMP	118
SLTA	1.633
Diploma I	21
Diploma II	1.111
Diploma III	239
Diploma IV	13
Strata 1	7.232
Strata 2	247
Strata 3	2
Total	10.007

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat

Adapun jumlah lembaga yang dikelola oleh Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Lembaga Yang Dikelola Dinas Pendidikan

Lembaga	Negeri	Swasta	Jumlah
TK	1	1.344	1.345
KB	-	426	426
PPT	-	898	898
TPA	-	39	39
SD	359	398	727
SMP	59	276	335
SMA	22	119	141
SMK	10	93	103
LKP	-	506	506
PKBM	-	40	40
Total	451	4.139	4.590

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dinas pendidikan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.4 UPTD Dinas Pendidikan

UPTD	Wilayah	Alamat
UPTD BPS I	Selatan	Jl. Jemursari II/33 Sby
UPTD BPS II	Timur	Jl.Mulyorejo 184-188 Sby
UPTD BPS III	Pusat	Jl.Bintang.Diponggo 873 Sby
UPTD BPS IV	Barat	Jl.Tandes Kidul No.94 Sby
UPTD BPS V	Utara	Jl.Bubutan 145-147 Sby

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.5 APBD Yang Dikelola Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Belanja	2011	2012	2013	2014	2015
Belanja Langsung	570.890.658.757	442.538.995.940	442.538.995.940	545.604.316.227	554.256.800.835
Belanja Tidak Langsung	915.087.628.601	984.491.987.901	984.491.987.901	1.174.487.307.969	1.204.502.541.970
Total Belanja	1.485.978.287.358	1.427.030.983.841	1.427.030.983.841	1.720.091.624.196	1.758.759.342.805

II.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Pencapaian rencana strategis (renstra) Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD				85,00%	90%	95%	97%	99,00%	85,26%	91,88%	95,25%	97,02%	99,01%	100,31%	102,09%	100,26%	100,02%	100,01%
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				85,00%	90%	95%	97%	99,00%	85,26%	91,88%	95,76%	97,50%	99,02%	100,31%	102,09%	100,80%	100,52%	100,02%
3	Angka Kelulusan (AL) SD/MI				100,00%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs				98,88%	98,98%	99,00%	99,30%	99,50%	99,73%	99,995%	99,995%	99,995%	100,00%	100,86%	101,03%	101,01%	100,70%	100,50%
5	Angka Partisipasi				92,95%	93%	95,00%	95,00%	95,00%	93,02%	97,02%	95,34%	97,02%	95,02%	100,08%	104,32%	100,36%	102,12%	100,02%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Murni (APM) SD/MI																		
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				105,20%	105,20%	105,20%	105,20%	105,20%	105,37%	105,21%	105,23%	108,30%	105,24%	100,16%	100,01%	100,03%	102,95%	100,04%
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				90,00%	92,50%	92,50%	95,00%	95,00%	90,26%	92,63%	92,88%	95,87%	95,03%	100,29%	100,14%	100,41%	100,92%	100,03%
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	107,17%	107,11%	105,15%	100,37%	105,03%	102,07%	102,01%	100,14%	95,59%	100,03%
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0026%	0,00%	0,0025%	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs				0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,0020%	0,00%	0,0023%	0,00%	104,17%	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs				98,50%	98,75%	99,00%	99,50%	99,50%	98,78%	99,42%	99,47%	99,60%	99,54%	100,28%	100,68%	100,47%	100,10%	100,04%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
12	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA				98,78%	98,88%	99,00%	99,15%	99,50%	99,33%	99,93%	99,94%	99,93%	99,97%	100,56%	101,06%	100,95%	100,79%	100,47%
13	Angka Kelulusan (AL) SMK				98,71%	98,81%	99,01%	99,11%	99,21%	99,94%	99,88%	99,99%	99,95%	99,97%	101,25%	101,08%	100,99%	100,85%	100,76%
14	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK				85,00%	87,50%	90,00%	92,50%	92,50%	85,77%	87,77%	90,12%	93,47%	92,55%	100,91%	100,31%	100,13%	101,05%	100,05%
15	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK				105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,09%	105,13%	105,23%	121,85%	105,08%	100,08%	100,12%	100,22%	116,05%	100,08%
16	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK				87,50%	90,00%	92,50%	95,00%	95,00%	90,00%	99,15%	99,16%	110,42%	100,04%	102,86%	110,17%	107,20%	116,23%	105,30%
17	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA				0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,046%	0,003%	0,01%	0,01%	0,00%	91,99%	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Angka Putus Sekolah (APS) SMK				0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	92,01%	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
19	Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha				55,00%	57,00%	60,00%	65,00%	70,00%	63,03%	63,54%	63,54%	61,40%	67,00%	114,61%	111,47%	105,90%	94,46%	95,72%
20	Angka Melek Huruf (AMH)				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21	Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi				84,08%	88,08%	92,08%	96,08%	100,00%	88,25%	91,08%	93,46%	97,05%	97,50%	104,96%	103,41%	101,50%	101,01%	97,50%

Berdasarkan tabel 2.6 terkait Pencapaian rencana strategis (renstra) Dinas Pendidikan dapat dijelaskan bahwa terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu: Angka putus sekolah. Dari tahun 2012-2015 angka putus sekolah ditargetkan sebesar 0% namun hal ini belum dapat tercapai. Masih ada beberapa anak usia sekolah baik jenjang SD, SMP, SMA/SMK yang mengalami putus sekolah. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor eksternal seperti:

1. Faktor biaya
2. Orang tua menginginkan anaknya bekerja untuk membantu mencari biaya hidup

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan menggandeng Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat serta Keluarga Berencana (Bappemas KB) melalui kegiatan outreach, dimana ketika ditemukan anak putus sekolah maka Dinas Pendidikan merangkul siswa tersebut dan mencarikan sekolah yang terdekat dengan rumah dan memberikan bantuan sekolah gratis hingga memberikan siswa tersebut seragam sekolah. Selain itu juga ada kegiatan *Campus Sosial Responsibility* (CSR) yang merupakan program kerja dari Dinas Sosial yang bertujuan untuk mendampingi siswa putus sekolah agar mau kembali ke sekolah.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan

Uraian		Anggaran					Realisasi					Rasio antara anggaran dan realisasi					Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Reali sasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	7.449 .168. 638	9.184.1 31.032	10.09 2.602 .066	8.264.0 23.971	6.157.4 75.202	3.933 .799. 014	5.691.4 01.926	6.559.2 13.447	4.419 .956. 652	5.093.5 86.221	52,81%	61,97 %	64,99%	53,48%	82,72 %	(258. 338.6 87)	231.9 57.44 1
	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	3.750 .144. 716	3.205.5 11.683	4.184 .334. 349	4.126.5 92.160	3.888.5 17.997	2.509 .450. 636	2.390.2 68.932	3.522.1 78.102	3.001 .694. 174	2.822.0 99.950	66,92%	74,57 %	84,18%	72,74%	72,58 %	27.67 4.656	62.52 9.863
Program Penyeleng garan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyeleng garan Pendidikan Anak Usia Dini	8.763 .842. 585	11.794. 613.27 0	22.70 1.459 .055	29.240. 903.36 5	33.784. 761.88 0	5.675 .725. 234	8.727.8 25.500	19.512. 919.54 0	24.35 3.209 .950	29.883. 504.03 0	64,76%	74,00 %	85,95%	83,28%	88,45 %	5.004 .183. 859	4.841 .555. 759
Program Penyeleng garan Pendidikan Dasar	Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan	94.06 8.687 .449	100.47 7.905.0 00	77.31 4.652 .396	97.779. 213.16 8	11.036. 223.07 4	16.98 0.854 .719	18.025. 224.75 0	36.290. 482.78 0	40.11 9.830 .156	11.076. 000	18,05%	17,94 %	46,94%	41,03%	0,10 %	(16.6 06.49 2.875)	(3.39 3.955 .744)

Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2016-2021

Uraian		Anggaran					Realisasi					Rasio antara anggaran dan realisasi					Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Reali sasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS	1.643.627.680	1.551.535.013	1.856.352.960	2.080.222.705	2.109.868.545	1.033.613.150	1.162.690.190	1.398.820.270	1.728.692.220	1.699.200.058	62,89%	74,94%	75,35%	83,10%	80,54%	93.248.173	133.117.382
	Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS	1.312.944.465	574.842.168	1.309.336.932	457.500.189	541.617.350	1.021.067.920	399.360.500	631.470.990	447.343.050	541.222.450	77,77%	69,47%	48,23%	97,78%	99,93%	(154.265.423)	(95.969.094)
Program Penyelenggaran Pendidikan Dasar	Penyelenggaran Sekolah Bertaraf Internasional DIKDAS	5.547.152.868	-	-	-	-	4.191.574.000	-	-	-	-	75,56%	N/A	N/A	N/A	N/A	(1.109.430.574)	(838.314.800)
	Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar	10.091.972.777	10.020.145.437	11.861.718.560	13.745.780.380	14.440.704.628	8.501.283.120	8.441.316.150	9.888.403.018	10.734.503.500	12.945.514.733	84,24%	84,24%	83,36%	78,09%	89,65%	869.746.370	888.846.323
	Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar	101.857.968.140	109.514.788.925	129.451.055.536	141.593.948.764	178.786.699.818	98.649.679.475	101.232.202.058	113.380.862.138	126.408.023.991	153.511.490.584	96,85%	92,44%	87,59%	89,28%	85,86%	15.385.746.336	10.972.362.222
	Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar	29.863.411.550	24.450.624.740	37.779.085.000	50.221.378.250	47.944.993.421	19.459.992.573	19.011.091.468	28.651.807.529	43.016.677.219	46.548.564.133	65,16%	77,75%	75,84%	85,65%	97,09%	3.616.316.374	5.417.714.312

**Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2016-2021**

Uraian		Anggaran					Realisasi					Rasio antara anggaran dan realisasi					Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Real isasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah DIKDAS	187.221.152	131.829.876	67.934.820	73.578.600		71.926.620	26.248.100	58.646.200	56.004.450		38,42%	19,91%	86,33%	76,12%	#DIV/0!	(37.444.230)	(14.385.324)
	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	2.038.593.538	1.791.487.510	2.746.377.105	5.291.485.149	4.006.685.430	1.052.743.600	763.723.300	1.467.510.410	3.162.744.305	2.266.588.350	51,64%	42,63%	53,43%	59,77%	56,57%	393.618.378	242.768.950
Program Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS	1.279.925.643	327.568.205	512.365.315	919.692.875	2.037.168.007	720.017.875	290.887.750	400.934.420	884.038.275	1.536.491.325	56,25%	88,80%	78,25%	96,12%	75,42%	151.448.473	163.294.690
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS	9.356.757.350	1.148.901.200	3.450.215.050	4.415.489.085	41.673.543.174	3.263.205.800	1.143.851.200	3.380.625.000	3.931.030.500	28.703.636.838	34,88%	99,56%	97,98%	89,03%	68,88%	6.463.357.165	5.088.086.208
	Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi)	-	-	216.725.000	37.405.000	111.100.000	-	-	215.683.700	-	99.660.000	N/A	N/A	99,52%	0,00%	89,70%	22.220.000	19.932.000
	Pelaksanaan Pemberian Biaya Operasional	95.966.437	284.267.089	215.040.00	-	-	95.966.437	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	N/A	N/A	(19.193.287.500)	(19.193.287.500)

**Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2016-2021**

Uraian		Anggaran					Realisasi					Rasio antara anggaran dan realisasi					Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Sekolah / BOS (Bantuan Keuangan Propinsi)	.500		0			.500))
Program Penyelenggaran Pendidikan Menengah dan Kejuruan	Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan industri	-	-	597.998.844	806.009.199	-	-	-	527.715.000	613.684.200	-	N/A	N/A	88,25%	76,14%	N/A	-	-
	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN	416.408.014	194.506.064	126.375.275	180.379.700	146.262.150	326.541.490	122.023.600	115.189.060	141.905.930	118.799.500	78,42%	62,74%	91,15%	78,67%	81,22%	(54.029.173)	(41.548.398)
	Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN	1.246.311.583	10.572.061.399		2.416.496.940	1.339.485.360	1.048.905.250	3.254.127.405		1.650.637.940	1.219.669.200	84,16%	30,78%	#DIV/0!	68,31%	91,06%	18.634.755	34.152.790
Program Penyelenggaran Pendidikan Menengah dan Kejuruan	Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional DIKMEN	83.319.424.180	-	-	-	-	74.227.699.450	-	-	-	-	89,09%	N/A	N/A	N/A	N/A	(16.663.884.836)	(14.845.539.890)
	Penerimaan Peserta Didik Baru	922.094.271	887.779.305	1.153.803.229	1.947.447.701	2.066.035.050	843.533.875	755.840.000	1.033.553.870	1.234.782.000	1.790.360.947	91,48%	85,14%	89,58%	63,41%	86,66%	228.788.156	189.365.414

**Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2016-2021**

Uraian		Anggaran					Realisasi					Rasio antara anggaran dan realisasi					Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Reali sasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah	627.08.998	611.224.564	3.457.376.590	4.251.000.000	1.860.375.000	588.584.700	570.995.800	1.407.585.245	2.337.280.000	1.782.423.900	93,87%	93,42%	40,71%	54,98%	95,81%	246.673.200	238.767.840
	Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah	35.888.557.221	85.590.451.380	83.179.387.500	81.348.085.487	86.274.628.753	34.986.710.575	78.797.396.302	73.532.913.245	77.364.880.357	77.027.507.331	97,49%	92,06%	88,40%	95,10%	89,28%	10.077.214.306	8.408.159.351
	Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKMEN) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan	-	-	21.534.601.000	6.979.790.369	-	-	-	-	3.698.518.428	-	N/A	N/A	0,00%	52,99%	N/A	-	-
Program Penyeleng garan Pendidikan Menengah dan Kejuruan	Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah	9.786.836.350	5.798.199.600	8.564.613.600	10.006.286.000	11.493.783.747	6.897.486.379	5.302.047.144	7.060.662.467	9.547.128.917	10.434.841.480	70,48%	91,44%	82,44%	95,41%	90,79%	341.389.479	707.471.020

**Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2016-2021**

Uraian		Anggaran					Realisasi					Rasio antara anggaran dan realisasi					Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Reali sasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN	2.055.399.614	578.800.000	760.800.000	1.053.852.510	1.193.132.565	2.015.712.700	525.200.000	221.500.000	592.067.450	744.386.100	98,07%	90,74%	29,11%	56,18%	62,39%	(172.453.410)	(254.265.320)
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN	7.467.250.091	4.590.248.867	3.437.967.156	2.109.671.520	3.753.115.300	3.458.628.620	3.533.960.800	209.749.600	2.109.671.520	254.977.920	46,32%	76,99%	6,10%	100,00%	6,79%	(742.826.958)	(640.730.140)
	Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah	993.162.745	725.267.380	-	-	1.145.262.858	964.252.950	639.452.900	-	-	803.219.400	97,09%	88,17%	N/A	N/A	70,13%	30.420.023	(32.206.710)
	Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)	-	1.127.074.325	570.000.000	235.000.000	415.000.000	-	-	-	-	148.555.500	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	35,80%	83.000.000	29.711.100
Program Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal	Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah	6.903.647.198	6.557.259.530	12.945.395.815	15.487.390.335	37.781.300.887	6.482.876.723	5.770.913.200	12.214.998.260	15.164.036.150	37.377.304.720	93,91%	88,01%	94,36%	97,91%	98,93%	6.175.530.738	6.178.885.599
	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS	3.721.853.089	2.933.692.298	4.086.693.496	3.684.278.950	4.181.357.405	2.481.674.875	2.096.582.350	2.956.104.665	3.038.425.815	3.469.470.685	66,68%	71,47%	72,33%	82,47%	82,97%	91.900.863	197.559.162

Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2016-2021

Uraian		Anggaran					Realisasi					Rasio antara anggaran dan realisasi					Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Reali sasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal	Pengembangan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi)	-	-	77.660.000	22.500.000	25.000.000	-	-	-	-	-	N/A	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	5.000.000	-
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan	866.386.152	482.580.514	1.002.231.499	-	-	566.189.700	371.347.800	638.004.900	-	-	65,35%	76,95%	63,66%	N/A	N/A	(173.277.230)	(113.237.940)
	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	3.903.042.400	3.417.944.560	2.223.163.400	1.979.795.750	1.512.626.500	3.160.990.400	1.874.492.800	1.928.892.510	1.509.992.300	1.487.846.500	80,99%	54,84%	86,76%	76,27%	98,36%	(478.083.180)	(334.628.780)
	Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan	25.336.309.849	31.736.755.006	60.728.116.465	48.173.398.105	51.569.076.774	19.638.528.370	24.953.491.622	40.935.972.125	38.519.265.540	47.177.986.576	77,51%	78,63%	67,41%	79,96%	91,49%	5.246.553.385	5.507.891.641
	Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/S LB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/ SMPLB/Salafiy	14.259.110.951	12.277.000.000	7.125.525.000	6.535.720.000	2.960.999.960	12.313.900.000	6.700.500.000	5.611.608.000	2.524.114.980	2.680.200.000	86,36%	54,58%	78,75%	38,62%	90,52%	(2.259.622.198)	(1.926.740.000)

Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2016-2021

Uraian		Anggaran					Realisasi					Rasio antara anggaran dan realisasi					Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Reali sasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	ah Wustho																	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)	-	-	93.960.000	140.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	N/A	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	4.000.000	-
	Total Belanja Langsung	570.890.658.757	442.538.995.940	515.424.923.013	545.604.316.227	554.256.800.835	433.033.587.293	302.574.463.547	373.754.006.491	422.310.139.969	472.180.184.431	75,85%	68,37%	72,51%	77,40%	85,19%	(3.326.771.584)	7.829.319.428
	Total Belanja Tidak Langsung	915.087.628.601	984.491.987.901	1.010.861.076.013	1.174.487.307.969	1.204.502.541.970	813.417.105.816	937.334.760.930	984.338.580.001	1.046.849.655.293	1.068.985.215.962	88,89%	95,21%	97,38%	89,13%	88,75%	57.882.982.674	51.113.622.029

ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

II.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

II.4.1. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra DINAS PENDIDIKAN

Tabel 2.8

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya (2010-2015)	Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (2014-2019)	Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014-2019)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	APK PAUD	99,02%	83,54%	78,70%
2	APK SD/SDLB/Paket A	105,24%	113,1%	100,55%
3	APK SMP/SMPLB/Paket B	105,03%	103,11%	83,77%
4	APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	105,08%	83,44%	85,71%
5	APM SD/SDLB	95,02%	98,10%	85,20%
6	APM SMP/SMPLB	95,03%	87,36%	73,72%
7	APM SMA/MK/SMLB/Paket C	92,55%	64,90%	67,50%
8	AL SD/MI	100%	100%	N/A
9	AL SMP/MTs	100%	99,23%	N/A

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya (2010-2015)	Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (2014-2019)	Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014-2019)
10	AL SMA/MA/SMK	99,97%	98,77%	N/A
11	AM SD/MI ke SMP/MTs	99,54%	99,11%	N/A
12	AM SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	100,04%	98,84%	N/A
13	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	0,05%	N/A
14	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	0,25%	N/A
15	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK	0,01%	0,56%	N/A
16	Angka Melek Huruf	100%	96%	96,10%
17	Rata-rata lama sekolah	10,24 tahun	9,1 tahun	8,8 tahun
18	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	97,50%	99,38%	95%

Sumber:

1. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
2. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 2.8 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dapat dikatakan sangat baik, hal ini terlihat dalam pencapaian terhadap target-target kinerja yang realisasi target 2015 lebih tinggi dibandingkan sasaran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan capaian Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan yang hasilnya diatas rata-rata provinsi bahkan nasional. Keadaan tersebut menandakan bahwa angka partisipasi sekolah di Kota Surabaya dan kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan sangat tinggi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Gambaran dari kualitas pelayanan pendidikan di Kota Surabaya secara umum dapat tercermin dari kinerja pelayanan fasilitas penunjang pendidikan. Jenis fasilitas pendidikan yang ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).

Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kualitas layanan pendidikan

Permasalahan mengenai kualitas layanan pendidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional;
2. Pemenuhan dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan;
3. Kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar;
4. Pendidikan yang mendorong daya inovasi dan kreativitas;
5. Pendidikan karakter dan pendidikan entrepreneur
6. Sistem manajemen dan tata kelola fasilitas pendidikan;

7. Sinkronisasi antara kurikulum di dunia pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.

b. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan

Permasalahan mengenai ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

c. Kerjasama penyelenggaraan pendidikan

Permasalahan mengenai kerjasama penyelenggaraan pendidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi pemerintah;
2. Keterbatasan dan kesenjangan kapasitas daerah dalam pengelolaan pendidikan;
3. Kerjasama dengan pihak luar negeri, dunia swasta, media serta pemerintah daerah dan stakeholder lainnya;
4. Keakuratan data pendidikan dalam menunjang perencanaan kebijakan yang tepat sasaran.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan SKPD)	(Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Data Pendidikan	Data sekolah/ lembaga Data siswa Data guru/tutor	Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi	Penyediaan system informasi yang handal dan akuntabel	Data dukung dari lembaga pendidikan	Kurangnya komitmen dari sekolah/lembaga untuk menyampaikan data
Rasio guru dan murid	Rasio guru dan murid di beberapa sekolah belum seimbang	Standar Pelayanan Minimal	Melakukan distribusi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan	Rekrutmen guru di sekolah swasta dilakukan oleh pihak yayasan	Distribusi terhadap guru belum merata

III.2. Perumusan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Adanya tuntutan peningkatan kualitas pendidikan	Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 bahwa terdapat pemindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi.	Pemindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi saat ini masih menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).	Diharapkan pengelolaan SMA/SMK tetap berada pada Kabupaten/Kota, terutama Surabaya dimana jumlah APBD untuk pendidikan sangat besar dibandingkan Kabupaten/Kota lain. APBD untuk pendidikan di Surabaya \pm 30%

III.3. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi: Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas; (dengan upaya: a. Meningkatkan kualitas pendidikan)	Kualitas layanan pendidikan perlu ditingkatkan; Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional; 2. Saranan dan prasaran yang belum memadai. 3. Kualitas penyelenggaraan proses belajar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya. 2. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar. 3. Proses belajar mengajar yang berkualitas. 4. Pendidikan yang mendorong inovasi

Visi: Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>mengajar;</p> <p>4. Sistem manajemen dan tata kelola fasilitas pendidikan belum tertata baik;</p> <p>5. Belum sinkronnya antara kurikulum di dunia pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.</p> <p>6. Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;</p> <p>7. Tingkat kesejahteraan</p>	<p>dan kreatifitas.</p> <p>5. Pendidikan karakter dan entrepreneur.</p> <p>6. Sinkronisasi antara kurikulum di dunia pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.</p> <p>7. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.</p> <p>8. Penyediaan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.</p>

Visi: Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pendidik dan tenaga kependidikan kurang; 8. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai.	9. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
6	Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat; (dengan upaya: a. Melestarikan budaya lokal; b. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.	Kesadaran dalam budaya membaca masih kurang	1. Rendahnya budaya baca di kalangan pelajar. 2. Kesadaran terhadap nilai-nilai budaya local masih rendah.	1. Menumbuhkan minat baca di kalangan pelajar melalui kegiatan wajib baca. 2. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya abudaya local.

Visi: Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c. Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan)			

Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”

Makna dalam visi tersebut adalah :

Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.

Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila.

Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Misi:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota;
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan;
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional;
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengemban misi 1 dan 6 yaitu:

Misi 1: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas; dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Misi 6: Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat; dengan upaya: melestarikan budaya lokal; meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat; memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

III.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Kualitas layanan pendidikan perlu ditingkatkan; Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas perlu ditingkatkan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional; 2. Saranan dan prasara yang belum memadai. 3. Kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar; 4. Sistem manajemen dan tata kelola fasilitas pendidikan belum tertata baik; 5. Belum sinkronnya antara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya. 2. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar. 3. Proses belajar mengajar yang berkualitas. 4. Pendidikan yang mendorong inovasi dan kreatifitas. 5. Pendidikan karakter dan entrepreneur.

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>kurikulum di dunia pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.</p> <p>6. Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;</p> <p>7. Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan kurang;</p> <p>8. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai.</p>	<p>6. Sinkronisasi antara kurikulum di dunia pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.</p> <p>7. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.</p> <p>8. Penyediaan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>9. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.</p>
8.	Melakukan revolusi karakter	Kesadaran dalam budaya	1. Rendahnya budaya baca	1. Menumbuhkan minat

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	bangsa Meningkatkan sumber daya manusia bidang pendidikan	membaca masih kurang	di kalangan pelajar. 2. Kesadaran terhadap nilai-nilai budaya local masih rendah.	baca di kalangan pelajar melalui kegiatan wajib baca. 2. Menumbuhkan kesadaran akan pentingny abudaya lokal.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1: Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas	Kualitas layanan pendidikan perlu ditingkatkan;	1. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional;	1. Meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya.
2.	Misi 2: Meningkatkan sumber daya manusia bidang pendidikan	Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas perlu ditingkatkan;	2. Saranan dan prasaran yang belum memadai. 3. Kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar; 4. Sistem manajemen dan tata kelola fasilitas pendidikan belum tertata baik; 5. Belum sinkronnya antara kurikulum di dunia pendidikan dengan	2. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar. 3. Proses belajar mengajar yang berkualitas. 4. Pendidikan yang mendorong inovasi dan kreatifitas. 5. Pendidikan karakter dan entrepreneur. 6. Sinkronisasi anatara kurikulum di dunia

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>kebutuhan kompetensi di dunia kerja.</p> <p>6. Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;</p> <p>7. Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan kurang;</p> <p>8. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai.</p>	<p>pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.</p> <p>7. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.</p> <p>8. Penyediaan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>9. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.</p>

III.5. Penentuan isu-isu strategis

Tabel 3.6
Nilai Kriteria Skala

Faktor	Deskripsi	Kriteria								TN	Rank	Identifikasi Isu Strategis (Narasi Isu Dibuat Berdasarkan Deskripsi Faktor)
		M (30%)		DU (20%)		C (20%)		VMK (30%)				
		Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot			
Opportunities	Pemberian beasiswa dari Pemerintah untuk siswa miskin dan tenaga pendidik (1)	5	1.5	4	0.8	4	0.8	5	1.5	4.6		Adanya pemberian beasiswa dari Pemerintah untuk siswa miskin dan tenaga pendidik
Opportunities	Dukungan pembiayaan untuk operasional pendidikan dari pemerintah (1)	5	1.5	3	0.6	3	0.6	3	0.899	3.6		Adanya dukungan pembiayaan untuk operasional pendidikan dari pemerintah
Opportunities	Partisipasi dan dukungan	4	1.2	3	0.6	3	0.6	3	0.899	3.3		Adanya partisipasi dan

Faktor	Deskripsi	Kriteria								TN	Rank	Identifikasi Isu Strategis (Narasi Isu Dibuat Berdasarkan Deskripsi Faktor)
		M (30%)		DU (20%)		C (20%)		VMK (30%)				
		Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot			
	masyarakat terhadap pendidikan dan kebutuhan pendidikan lifeskill (1) (6)											dukungan masyarakat terhadap pendidikan dan kebutuhan pendidikan lifeskill
Opportunities	Partisipasi dan dukungan dari stakeholder eksternal (perguruan tinggi, CSR, praktisi pendidikan, dewan pendidikan) (1)	3	0.899	3	0.6	3	0.6	3	0.899	3		Adanya partisipasi dan dukungan dari stakeholder eksternal (perguruan tinggi, CSR, praktisi pendidikan, dewan pendidikan)
Opportunities	Pelimpahan kebijakan pendidikan informal dan nonformal provinsi ke kota (1)	2	0.6	2	0.4	3	0.6	2	0.6	2.2		Pelimpahan kebijakan pendidikan informal dan nonformal yang diserahkan provinsi ke kota

Faktor	Deskripsi	Kriteria								TN	Rank	Identifikasi Isu Strategis (Narasi Isu Dibuat Berdasarkan Deskripsi Faktor)
		M (30%)		DU (20%)		C (20%)		VMK (30%)				
		Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot			
Strengths	Ketersediaan, kualifikasi dan kompetensi pendidik sesuai standar untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah (1)	5	1.5	5	1	5	1	5	1.5	5	1	Ketersediaan, kualifikasi dan kompetensi pendidik yang telah sesuai standar untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah
Strengths	Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan (1)	5	1.5	5	1	5	1	5	1.5	5	2	Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan
Strengths	Pemerataan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk semua jenjang (1)	5	1.5	5	1	5	1	5	1.5	5	3	Meratanya aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk semua jenjang
Strengths	Ketersediaan anggaran pendidikan melebihi alokasi minimal yang	5	1.5	5	1	5	1	5	1.5	5		Tetersedianya anggaran pendidikan melebihi alokasi minimal yang

Faktor	Deskripsi	Kriteria								TN	Rank	Identifikasi Isu Strategis (Narasi Isu Dibuat Berdasarkan Deskripsi Faktor)
		M (30%)		DU (20%)		C (20%)		VMK (30%)				
		Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot			
	disyaratkan secara nasional (1)											disyaratkan secara nasional
Strengths	Potensi siswa Surabaya (1)	5	1.5	4	0.8	4	0.8	4	1.2	4.3		Potensi siswa Surabaya yang unggul
Threats	Kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan menengah dan khusus yang pindah ke provinsi (1)	5	1.5	5	1	4	0.8	4	1.2	4.5		Adanya kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan menengah dan khusus yang pindah ke provinsi
Threats	Keterbukaan akses informasi (6)	3	0.899	2	0.4	3	0.6	2	0.6	2.5		Keterbukaan akses informasi berakibat pada penyalahgunaan informasi
Threats	Masuknya budaya negara lain akibat MEA (6)	2	0.6	1	0.2	2	0.4	1	0.3	1		Masuknya budaya negara lain akibat MEA yang bersaing dengan budaya

Faktor	Deskripsi	Kriteria								TN	Rank	Identifikasi Isu Strategis (Narasi Isu Dibuat Berdasarkan Deskripsi Faktor)
		M (30%)		DU (20%)		C (20%)		VMK (30%)				
		Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot			
												lokal
Threats	Overlapping regulasi terkait perijinan lembaga kursus (1)	1	0.3	1	0.2	2	0.4	1	0.3	1.5		Overlapping regulasi terkait perijinan lembaga kursus yang ditangani Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja
Weakness	Kesesuaian sarana dan prasarana pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan (1)	5	1.5	3	0.6	3	0.6	4	1.2	3.9		Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
Weakness	Kesesuaian jumlah, kualifikasi, dan kompetensi tenaga kependidikan dengan standar	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.3	1		Jumlah, kualifikasi, dan kompetensi tenaga kependidikan tidak sesuai dengan standar

Faktor	Deskripsi	Kriteria								TN	Rank	Identifikasi Isu Strategis (Narasi Isu Dibuat Berdasarkan Deskripsi Faktor)
		M (30%)		DU (20%)		C (20%)		VMK (30%)				
		Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot	Nilai	Nilai x bobot			
	(1)											
Weakness	Optimalisasi Threats fungsi penilik PLS (1)	5	1.5	5	1	5	1	5	1.5	5		Fungsi penilik PLS yang kurang optimal
Weakness	Ketersediaan jumlah dan variasi bahan bacaan di sekolah serta sarana pendukung literasi sesuai standar (6)	5	1.5	4	0.8	4	0.8	5	1.5	4.6		Ketersediaan jumlah dan variasi bahan bacaan di sekolah serta sarana pendukung literasi tidak sesuai standar
Weakness	Pemenuhan pendidikan anak usia dini yang sesuai standart (1)	5	1.5	3	0.6	2	0.4	4	1.2	3.7		Pemenuhan pendidikan anak usia dini yang tidak sesuai standart

Alternatif isu strategis perlu dinilai untuk dapat menentukan prioritas isu. Penilaian didasarkan pada:

Manfaat/Dampak Bagi Publik (M)	Bobot = 30
Daya Ungkit Pembangunan Daerah (DU)	Bobot = 20
Kemungkinan/Kemudahan untuk Di-Capai/Ditangani (C)	Bobot = 20
Pokok Isu terkandung dalam Visi-Misi Kota (VMK)	Bobot = 30

Berdasarkan hasil nilai kriteria skala yang telah diinput pada aplikasi e-indicators didapatkan 3 rumusan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kota Surabaya, meliputi:

1. Ketersediaan, kualifikasi dan kompetensi pendidik yang telah sesuai standar untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan.
3. Meratanya aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk semua jenjang

Penentuan isu-isu strategis diawali dengan analisa SWOT, dimana dilakukan pembobotan terhadap faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: kekuatan dan kelemahan. Sedangkan factor eksternal meliputi peluang dan ancaman.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan

IV.1.1. Perumusan Visi

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 yaitu:

“Menjadikan Surabaya sebagai barometer dan inspirator pendidikan nasional”

Tabel 4.1
Perumusan Perwujudan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Ketersediaan, kualifikasi dan kompetensi pendidik yang telah sesuai standar untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	Barometer dan Inspirator	Menjadikan Surabaya sebagai barometer dan inspirator pendidikan nasional
2	Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan		
3	Meratanya aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk semua jenjang		

IV.1.2. Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi

Tabel 4.2
Perumusan Penjelasan Visi

No.	Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
1.	Menjadikan Surabaya sebagai barometer dan inspirator pendidikan nasional	Barometer	Barometer yang dimaksud adalah pendidikan di Kota Surabaya dapat dijadikan standar penilaian ideal pendidikan yang ada di Indonesia.
		Inspirator	Inspirator yang dimaksud adalah bahwa pendidikan di Kota Surabaya dapat menjadi inspirasi pembangunan pendidikan di kota-kota lain di seluruh Indonesia.

IV.1.3. Perumusan Misi

Visi dan pokok-pokok visi yang telah diperoleh, selanjutnya pokok-pokok visi disandingkan dengan stakeholder pembangunan/layanan terkait dengan visi tersebut ditandai dan dijelaskan sebagai rincian misi kenapa stakeholder tersebut mempengaruhi pokok-pokok misi. Upaya untum mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 2 (dua) misi pembangunan pendidikan di Kota Surabaya.

Misi 1: Mewujudkan layanan akses pendidikan yang bermutu secara Merata dan Berkeadilan

Misi 2: Memperkuat Budaya Lokal dalam sendi-sendi Pendidikan

IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

IV.2.1. Perumusan Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan Dinas Pendidikan:

1. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal;
2. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal;
3. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan budaya lokal;
4. Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca;

IV.2.2. Perumusan Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1. Terwujudnya Satuan Pendidikan Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
2. Terwujudnya Satuan Pendidikan Non Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
3. Terwujudnya perlindungan dan pengembangan Budaya Lokal
4. Terwujudnya Minat dan Budaya Baca di kalangan pendidikan

Tabel 4.3

Deployment Renstra Dinas Pendidikan dengan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021				Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021			
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi	Misi 1: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Menjadikan Surabaya sebagai barometer dan inspirator pendidikan nasional	Misi 1: Mewujudkan layanan akses pendidikan yang bermutu secara Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Terwujudnya Satuan Pendidikan Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
			Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal			Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal	Terwujudnya Satuan Pendidikan Non Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
	Misi 6: Memperkuat nilai-nilai budaya local dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal		Misi 2: Memperkuat Budaya Lokal dalam sendi-sendi Pendidikan	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan budaya lokal	Terwujudnya perlindungan dan pengembangan Budaya Lokal
		Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca			Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Terwujudnya Minat dan Budaya Baca di kalangan pendidikan

IV.3. Strategi dan Kebijakan

IV.3.1. Kebijakan Umum

Guna lebih mempertajam Visi dan Misi serta derivasinya pada strategi Pembangunan Jangka Menengah Surabaya Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat dan terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut:

- a. Kebijakan pada perspektif masyarakat atau layanan akan ditekankan pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan menuju masyarakat yang sentosa secara merata dan berkeadilan. Penyediaan kebutuhan utama sandang, pangan dan papan yang didukung dengan pembangunan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain).
- b. Kebijakan pada perspektif proses internal akan diarahkan pada reformasi birokrasi menuju sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjamin kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kualitas layanan secara cepat, mudah dan terjangkau sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan diarahkan pada optimalisasi, fungsi koordinasi dan penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan diarahkan pada peningkatan dan optimalisasi kebijakan pendapatan daerah serta pengelolaan belanja

daerah dan dana perimbangan dari pusat. Pengelolaan aset dan keuangan daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

IV.3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi misi kota melalui arah kebijakan dan strategi yang telah disebutkan dalam BAB VI maka disusunlah program yang merupakan pedoman bagi SKPD untuk merumuskan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, adapun strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Strategi Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan

Strategi Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a. Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah
- b. Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi
- c. Pembangunan lokal/ruang kelas
- d. Penyediaan biaya operasional pendidikan
- e. Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Pendidikan Menengah. Indikator dari Program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain:

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain:

- a. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
- b. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
- d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
- e. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- f. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- g. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
- h. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
- i. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Indikator dari Program Pendidikan Menengah, antara lain:

- a. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
- c. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK
- d. Angka Kelulusan (AL) SMK
- e. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA
- f. Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi
- g. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
- h. Angka Putus Sekolah (APS) SMK

Pada tahun 2017-2021, Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan, antara lain:

Indikator dari Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan, antara lain:

- a. Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarannya

- b. Persentase lembaga pendidikan yang sarana prasarananya sesuai standar:
 - SD
 - SMP
 - SMA
 - SMK
- c. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan;
 - SD/MI
 - SMP/MTs
 - SMA/MA/SMK
- d. Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik

2. Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan formal

Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan formal, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a. Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan
- b. Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak
- c. Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah
- d. Penyiapan lulusan pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing
- e. Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah. Untuk strategi d) pada tahun 2016 di dukung oleh Program Peningkatan Prestasi Non Akademik dengan indikator Persentase prestasi non akademik.

Indikator dari Program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain:

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain:

- a. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
- b. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
- d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
- e. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- f. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- g. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
- h. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
- i. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Indikator dari Program Pendidikan Menengah, antara lain:

- a. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
- c. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK
- d. Angka Kelulusan (AL) SMK
- e. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA
- f. Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi
- g. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
- h. Angka Putus Sekolah (APS) SMK

Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) pada tahun 2017-2021, didukung oleh Program Penerapan Kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Penerapan Kurikulum, antara lain:

- a. Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan
- b. Persentase lembaga pendidikan yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum :
 - SD
 - SMP
 - SMA
 - SMK

Sedangkan, untuk arah kebijakan d) sampai arah kebijakan e) pada tahun 2017-2021, didukung oleh Program Peningkatan Prestasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Peningkatan Prestasi, antara lain:

- a. Persentase prestasi pada event tingkat provinsi/nasional/internasional pada jenjang :
 - SD
 - SMP
 - SMA
 - SMK
- b. Persentase PAUD beprestasi

3. Strategi Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Strategi Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a. Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik
- b. Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Sertifikasi bagi Pendidik

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator persentase pendidik yang kompeten. Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, antara lain:

- a. Persentase guru PAUD yang kompeten
- b. Persentase guru yang memiliki sertifikasi :

- SD
 - SMP
 - SMA
 - SMK
- c. Persentase guru yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar :
- SMP
 - SMA
 - SMK
- d. Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4
- e. Persentase tenaga kependidikan yang kompeten :
- PAUD
 - SD
 - SMP
 - SMA
 - SMK

4. Strategi Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal

Strategi Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a. Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah
- b. Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Pendidikan Menengah.

Indikator dari Program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain:

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain:

- a. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
- b. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
- d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
- e. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- f. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- g. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
- h. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
- i. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Indikator dari Program Pendidikan Menengah, antara lain:

- a. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
- c. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK
- d. Angka Kelulusan (AL) SMK
- e. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA
- f. Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi
- g. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
- h. Angka Putus Sekolah (APS) SMK

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan indikator:

Persentase lembaga pendidikan yang tertib administrasi jenjang :

- SD
- MI
- SMP
- MTs
- SMA
- MA
- SMK

5. Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal

Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a. Penjaringan siswa kejar paket
- b. Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket
- c. Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
- d. Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh Program Pendidikan Non Formal dengan indikator, antara lain :

- a. Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang siap untuk diakreditasi
- b. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan

Untuk arah kebijakan a) dan arah kebijakan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh Program Pendidikan Kesetaraan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan indikator:

Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan :

- Paket A
- Paket B
- Paket C

Sedangkan, untuk arah kebijakan c) sampai dan arah kebijakan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan, antara lain:

- a. Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftarkan proses akreditasi
- b. Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

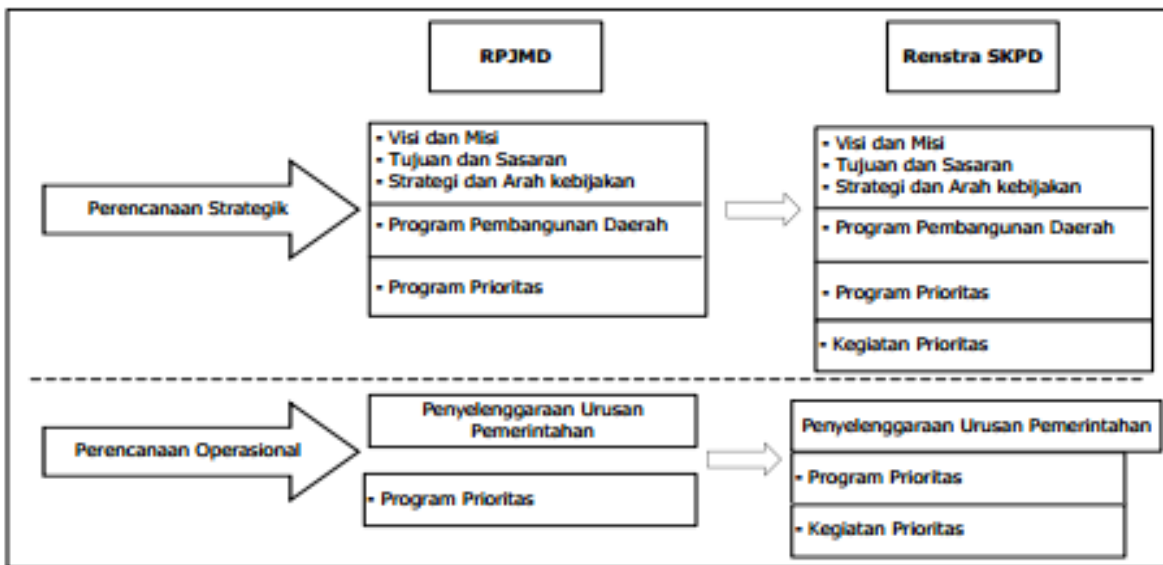
V.1. Keterkaitan Program dengan Visi Misi Dinas Pendidikan

Untuk mendukung visi misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 berikut 10 (sepuluh) program yang diemban oleh Dinas Pendidikan, diantaranya :

Tabel 5.1 Keterkaitan Program dengan Visi Misi Dinas Pendidikan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
Menjadikan Surabaya sebagai barometer dan inspirator pendidikan nasional	Mewujudkan layanan akses pendidikan yang bermutu secara Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Terwujudnya Satuan Pendidikan Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
				Program pengembangan Penerapan Kurikulum
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Program Peningkatan Prestasi Siswa
				Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan
	Memperkuat Budaya Lokal dalam sendi-sendi Pendidikan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal	Terwujudnya Satuan Pendidikan Non Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	Program Pendidikan Kesetaraan
				Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan
				Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
				PrograProgram Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
				Program pengembangan seni dan nilai-nilai budaya lokal

V.2. Keterhubungan Renstra Dinas Pendidikan dengan RPJMD



Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah termasuk program prioritas di dalamnya, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Program harus disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program, dalam penyusunan program harus melibatkan SKPD berkenaan.
- Penamaan program dengan kalimat sederhana, ringkas mudah dimengerti sehingga dapat dijabarkan kedalam kegiatan.
- Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mencapai target kinerja sasaran melalui strategi dan arah kebijakan.

Perumusan output/keluaran yang akan dihasilkan dalam rangka pencapaian outcome, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Sebuah outcome dapat dicapai dengan satu atau beberapa output.
- Disusun dengan melibatkan SKPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan outcome yang ditetapkan dalam pembangunan jangka menengah daerah. Disusun untuk menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renstra SKPD.

Tabel 5.2

Keterhubungan Renstra Dinas Pendidikan dengan RPJMD

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021				Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021			
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi	Misi 1: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Menjadikan Surabaya sebagai barometer dan inspirator pendidikan nasional	Misi 1: Mewujudkan layanan akses pendidikan yang bermutu secara Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Terwujudnya Satuan Pendidikan Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
			Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal			Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal	Terwujudnya Satuan Pendidikan Non Formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
	Misi 6: Memperkuat nilai-nilai budaya local dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal		Misi 2: Memperkuat Budaya Lokal dalam sendi-sendi Pendidikan	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan budaya lokal	Terwujudnya perlindungan dan pengembangan Budaya Lokal
		Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca			Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Terwujudnya Minat dan Budaya Baca di kalangan pendidikan

V.3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran

No.	Program	No.	Kegiatan	Sasaran
I	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Pengadaan sarana prasarana PAUD	Lembaga PAUD
		2	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Lembaga PAUD
		3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS	SD, SMP
		4	Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar	SD, SMP
		5	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Pendidikan Dasar	SD, SMP
		6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN	SMA, SMK
		7	Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah	SMA, SMK
		8	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Pendidikan Menengah	SMA, MA, SMK
		9	Fasilitasi penerimaan peserta didik baru	Calon peserta didik baru
II	Program Penerapan Kurikulum	1	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS	Siswa SD, SMP
		2	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS	Guru dan Siswa SD, SMP
		3	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS	Siswa Layanan Khusus
		4	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN	Siswa Layanan Khusus
		5	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN	Siswa SMA, SMK
		6	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN	Guru dan Siswa SMA, SMK
III	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Pendidik PAUD
		2	Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik di Jenjang Pendidikan Dasar	Guru SD, SMP
		3	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		4	Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	Guru Swasta
		5	Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik di Jenjang Pendidikan Menengah	Guru SMA, SMK

No.	Program	No.	Kegiatan	Sasaran
IV	Program Peningkatan Prestasi	1	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Lembaga PAUD
		2	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Pendidikan Dasar	Sekolah DIKDAS
		3	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Siswa SMK
		4	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Pendidikan Menengah	Sekolah DIKMEN
		5	Fasilitasi Promosi Lembaga Pendidikan dan Kompetensi Siswa	Siswa DIKDAS dan DIKMEN
V	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	1	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (diseminasi pendidikan)	Sekolah DIKDAS
		2	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah	Sekolah DIKMEN
		3	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	Siswa, guru, komite sekolah
VI	Program Pendidikan Kesetaraan	1	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Siswa pendidikan kesetaraan dan PKBM
VII	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	1	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	PKBM
		2	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Gutu TPA?TPQ dan kelas minggu
VIII	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	1	Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Siswa SMA, SMK
		2	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS	Siswa PLS
IX	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah	Siswa SD, SMP, SMA, SMK
X	Program pengembangan seni dan nilai-nilai budaya lokal	2	Fasilitasi Pengembangan Seni di Sekolah	Sekolah

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan	Persentase SD yang siswanya lulus 100%	(Jumlah SD yang siswanya lulus 100% : Jumlah SD)*100%	85,01%	86,24%	87,48%	88,58%	89,68%	90,78%
		Persentase SMP yang siswanya lulus 100%	(Jumlah SMP yang siswanya lulus 100% : Jumlah SMP)*100%	80,00%	82,09%	84,18%	86,27%	88,36%	90,45%
		Persentase SMA yang siswanya lulus 100%	(Jumlah SMA yang siswanya lulus 100% : Jumlah SMA)*100%	78,01%	80,14%	82,27%	85,11%	87,94%	90,78%
		Persentase SMK yang siswanya lulus 100%	(Jumlah SMK yang siswanya lulus 100% : Jumlah SMK)*100%	76,70%	79,61%	82,52%	84,47%	86,41%	88,35%
		Persentase sekolah pelaksana ujian akhir yang tidak ditemukan kecurangan jenjang SD	(Jumlah SD pelaksana ujian akhir yang tidak ditemukan kecurangan : Jumlah SD)*100%	69,60%	70,15%	70,70%	71,25%	71,80%	72,35%
		Persentase sekolah pelaksana ujian akhir yang tidak ditemukan kecurangan jenjang SMP	(Jumlah SMP pelaksana ujian akhir yang tidak ditemukan kecurangan : Jumlah SMP)*100%	80,00%	82,09%	84,18%	86,27%	88,36%	90,45%

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Persentase sekolah pelaksana ujian akhir yang tidak ditemukan kecurangan jenjang SMA	(Jumlah SMA pelaksana ujian akhir yang tidak ditemukan kecurangan : Jumlah SMA)*100%	78,01%	80,14%	82,27%	84,40%	86,52%	88,65%
		Persentase sekolah pelaksana ujian akhir yang tidak ditemukan kecurangan jenjang SMK	(Jumlah SMK pelaksana ujian akhir yang tidak ditemukan kecurangan : Jumlah SMK)*100%	76,70%	79,61%	82,52%	84,47%	86,41%	88,35%
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah siswa SD/MI yang lulus ujian : Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti ujian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus ujian : Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian	98,90%	99,00%	99,10%	99,15%	99,20%	99,25%
		Angka Kelulusan (AL) SMA/MA	Jumlah siswa SMA/MA yang lulus ujian : Jumlah siswa SMA/MA yang mengikuti ujian	97,80%	98,00%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%
		Angka Kelulusan (AL) SMK	Jumlah siswa SMK yang lulus ujian : Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian	97,80%	98,00%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	Jumlah siswa SD/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs : Jumlah siswa SD/MI yang lulus ujian	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	Jumlah siswa SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK : Jumlah siswa SMP/MTs	97,80%	98,00%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			yang lulus ujian						
		Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi	(Jumlah lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi : Jumlah lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) x 100%	21,66%	23,90%	26,14%	28,38%	30,62%	32,86%
		Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi	(Jumlah lembaga pendidikan nonformal yang terakreditasi : Jumlah lembaga pendidikan nonformal) x 100%	9,49%	15,22%	20,95%	26,88%	33,00%	39,33%
A	Sasaran 1 : Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Jumlah siswa PAUD : Jumlah penduduk usia 3-6 tahun	61,34%	64,56%	65,93%	67,37%	68,89%	70,50%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Jumlah siswa SD/MI : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	96,16%	99,13%	99,30%	99,54%	99,85%	100,00%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Jumlah siswa SMP/MTs : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	88,25%	90,98%	91,13%	91,35%	91,64%	91,99%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Jumlah siswa SMA/MA/SMK : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	87,04%	89,74%	89,88%	90,10%	90,38%	90,73%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	92,67%	95,54%	95,69%	95,93%	96,23%	96,59%
		Angka Partisipasi Murni (APM)	Jumlah siswa SMP/MTs usia 13-15 tahun : Jumlah	81,07%	83,58%	83,72%	83,92%	84,18%	84,50%

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		SMP/MTs	penduduk usia 13-15 tahun						
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	Jumlah siswa SMA/MA/SMK usia 16-18 tahun : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	81,35%	83,86%	84,00%	84,20%	84,47%	84,79%
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah siswa SD/MI yang putus sekolah : Jumlah siswa SD/MI	1,08%	1,00%	0,93%	0,86%	0,79%	0,73%
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah siswa SMP/MTs yang putus sekolah : Jumlah siswa SMP/MTs	1,08%	1,00%	0,93%	0,86%	0,79%	0,73%
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	Jumlah siswa SMA/MA yang putus sekolah : Jumlah siswa SMA/MA	1,04%	1,00%	0,93%	0,87%	0,80%	0,75%
		Angka Putus Sekolah (APS) SMK	Jumlah siswa SMK yang putus sekolah : Jumlah siswa SMK	1,04%	1,00%	0,93%	0,87%	0,80%	0,74%
		Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi diterima di dunia kerja	Jumlah siswa SMK yang bersertifikasi tahun (t-1) diterima di dunia kerja : Jumlah siswa SMK yang bersertifikasi tahun (t-1)	38,00%	40,00%	42,00%	44,00%	46,00%	48,00%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan formal PAUD yang memenuhi standar	Jumlah PAUD formal yang memenuhi standar : Jumlah PAUD formal	9,44%	10,19%	10,93%	11,67%	12,42%	13,16%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan formal SD/MI yang memenuhi standar	Jumlah SD/MI yang memenuhi standar : Jumlah SD/MI	31,73%	33,41%	35,09%	36,77%	38,45%	40,13%
		Peningkatan jumlah lembaga	Jumlah SMP/MTs yang memenuhi standar : Jumlah	44,25%	47,57%	50,90%	54,22%	57,54%	60,87%

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		pendidikan formal SMP/MTs yang memenuhi standar	SMP/MTs						
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan formal SMA/MA yang memenuhi standar	Jumlah SMA/MA yang memenuhi standar : Jumlah SMA/MA	11,45%	21,69%	31,93%	42,17%	52,41%	62,65%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan formal SMK yang memenuhi standar	Jumlah SMK yang memenuhi standar : Jumlah SMK	33,96%	43,40%	52,83%	62,26%	71,70%	81,13%
		Peningkatan daya tampung SD/MI relatif terhadap jumlah kebutuhan	daya tampung SD/MI tahun berjalan : jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada tahun berjalan	97,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Peningkatan daya tampung SMP/MTs relatif terhadap jumlah kebutuhan	daya tampung SMP/MTs tahun berjalan : jumlah penduduk usia 13-15 tahun pada tahun berjalan	97,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Peningkatan daya tampung SMA/MA/SMK relatif terhadap jumlah kebutuhan	daya tampung SMA/MA/SMK tahun berjalan : jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada tahun berjalan	97,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
B	Sasaran 2 : Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal	Peningkatan jumlah lembaga pendidikan nonformal yang memenuhi standar	Jumlah lembaga pendidikan nonformal yang memenuhi standar : Jumlah lembaga pendidikan nonformal	9,49%	15,22%	20,95%	26,88%	33,00%	39,33%
		Ketuntasan	Jumlah peserta pendidikan	88,22%	88,48%	88,75%	89,02%	89,28%	89,55%

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		pendidikan kesetaraan	kesetaraan yang lulus / Jumlah peserta pendidikan kesetaraan						
I	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya	(Jumlah PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya : Jumlah PAUD total) x 100%	13,22%	25,00%	36,78%	49,04%	65,95%	79,21%
		Rata-rata rombel SD Negeri	Total jumlah rombel SD Negeri seluruh kota : Jumlah SD Negeri	1313,04%	13,40	13,67	13,94	14,22	14,50
		Rata-rata rombel SMP Negeri	Total jumlah rombel SMP Negeri seluruh kota : Jumlah SMP Negeri	2431,41%	24,81	25,31	25,81	26,33	26,86
		Rata-rata rombel SMA Negeri	Total jumlah rombel SMA Negeri seluruh kota : Jumlah SMA Negeri	2840,91%	29,00	29,59	30,18	30,77	31,41
		Rata-rata rombel SMK Negeri	Total jumlah rombel SMK Negeri seluruh kota : Jumlah SMK Negeri	6140,00%	62,70	64,00	65,20	66,50	67,90
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	Jumlah SD yang sarana prasarananya sesuai standar : Jumlah SD	68,60%	70,00%	71,40%	72,83%	74,28%	75,77%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya	Jumlah SMP yang sarana prasarananya sesuai standar : Jumlah SMP	73,50%	75,00%	76,50%	78,03%	79,59%	81,18%

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		sesuai standar							
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarannya sesuai standar	Jumlah SMA yang sarana prasarannya sesuai standar : Jumlah SMA	74,07%	75,89%	77,70%	82,98%	85,11%	86,52%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarannya sesuai standar	Jumlah SMK yang sarana prasarannya sesuai standar : Jumlah SMK	72,82%	74,76%	76,70%	77,67%	79,61%	81,55%
II	Program Penerapan Kurikulum	Peningkatan PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	Jumlah PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan : Jumlah PAUD	21,05%	35,08%	49,11%	68,69%	79,03%	86,60%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	Jumlah SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum : Jumlah SD	78,40%	80,00%	81,60%	83,23%	84,90%	86,59%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	Jumlah SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum : Jumlah SMP	78,40%	80,00%	81,60%	83,23%	84,90%	86,59%

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	Jumlah SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum : Jumlah SMA	78,72%	80,14%	81,56%	82,98%	85,11%	86,52%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	Jumlah SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum : Jumlah SMK	77,67%	79,61%	81,55%	83,50%	84,47%	86,41%
III	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan jumlah guru PAUD yang kompeten	Jumlah guru PAUD yang kompeten : Jumlah guru PAUD	58,73%	62,18%	65,63%	69,09%	72,54%	76,00%
		Peningkatan jumlah guru SD yang memiliki sertifikasi	Jumlah guru SD yang memiliki sertifikasi : Jumlah guru SD	57,08%	65,66%	74,23%	82,81%	90,37%	97,92%
		Peningkatan jumlah guru SMP yang memiliki sertifikasi	Jumlah guru SMP yang memiliki sertifikasi : Jumlah guru SMP	68,00%	74,39%	80,77%	85,93%	90,35%	94,78%
		Peningkatan jumlah guru SMA yang memiliki sertifikasi	Jumlah guru SMA yang memiliki sertifikasi : Jumlah guru SMA	63,99%	71,88%	79,77%	86,72%	93,19%	98,25%

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Peningkatan jumlah guru SMK yang memiliki sertifikasi	Jumlah guru SMK yang memiliki sertifikasi : Jumlah guru SMK	60,08%	68,49%	76,91%	84,00%	90,26%	96,53%
		Peningkatan jumlah guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	Jumlah guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar : Jumlah guru SMP	93,13%	95,43%	97,73%	100,00%	100,00%	100,00%
		Peningkatan jumlah guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	Jumlah guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar : Jumlah guru SMA	96,74%	97,93%	99,13%	100,00%	100,00%	100,00%
		Peningkatan jumlah guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	Jumlah guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar : Jumlah guru SMK	93,02%	95,17%	97,31%	100,00%	100,00%	100,00%
		Peningkatan jumlah guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang	Jumlah guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA	84,80%	86,53%	94,79%	100,00%	100,00%	100,00%

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	4 : Jumlah guru SD						
		Peningkatan jumlah tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	Jumlah tenaga kependidikan PAUD yang kompeten : Jumlah tenaga kependidikan PAUD	46,48%	53,63%	60,78%	67,93%	75,08%	82,23%
		Peningkatan jumlah tenaga kependidikan SD yang kompeten	Jumlah tenaga kependidikan SD yang kompeten : Jumlah tenaga kependidikan SD	42,20%	46,37%	50,54%	54,71%	58,88%	63,05%
		Peningkatan jumlah tenaga kependidikan SMP yang kompeten	Jumlah tenaga kependidikan SMP yang kompeten : Jumlah tenaga kependidikan SMP	47,26%	51,82%	56,39%	60,95%	65,51%	70,07%
		Peningkatan jumlah tenaga kependidikan SMA yang kompeten	Jumlah tenaga kependidikan SMA yang kompeten : Jumlah tenaga kependidikan SMA	53,24%	55,56%	57,87%	62,50%	67,13%	70,60%
		Peningkatan jumlah tenaga kependidikan SMK yang kompeten	Jumlah tenaga kependidikan SMK yang kompeten : Jumlah tenaga kependidikan SMK	45,50%	49,91%	54,32%	58,73%	63,14%	67,55%
IV	Program Peningkatan Prestasi	Tingkat prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	Jumlah prestasi SD yang diraih : Jumlah prestasi SD yang diperebutkan dalam seluruh event yang diikuti	38,46%	45,16%	46,15%	62,50%	64,29%	71,88%
		Tingkat prestasi SMP pada event	Jumlah prestasi SMP yang diraih : Jumlah prestasi	46,15%	50,00%	50,00%	62,50%	66,67%	70,59%

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		tingkat provinsi/nasional/in ternasional	SMP yang diperebutkan dalam seluruh event yang diikuti						
		Tingkat prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/in ternasional	Jumlah prestasi SMA yang diraih : Jumlah prestasi SMA yang diperebutkan dalam seluruh event yang diikuti	54,55%	63,64%	63,64%	72,73%	81,82%	81,82%
		Tingkat prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/in ternasional	Jumlah prestasi SMK yang diraih : Jumlah prestasi SMK yang diperebutkan dalam seluruh event yang diikuti	21,15%	25,00%	28,85%	32,69%	36,54%	40,38%
		Peningkatan PAUD berprestasi	Jumlah PAUD berprestasi : Jumlah PAUD	0,59%	1,14%	1,70%	2,25%	2,81%	3,36%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	Jumlah SD yang tertib administrasi : Jumlah SD	52,76%	56,82%	60,88%	64,94%	68,99%	73,05%
V	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan jumlah lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	Jumlah MI yang tertib administrasi : Jumlah MI	36,24%	39,60%	42,95%	46,31%	49,66%	53,02%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	Jumlah SMP/MTs yang tertib administrasi : Jumlah SMP/MTs	47,04%	64,44%	81,85%	83,70%	85,56%	87,04%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan MTs yang tertib	Jumlah MTs yang tertib administrasi : Jumlah MTs	28,57%	38,78%	48,98%	59,18%	69,39%	79,59%

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		administrasi							
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi	Jumlah SMA yang tertib administrasi : Jumlah SMA	44,68%	50,00%	55,32%	60,64%	65,96%	71,28%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi	Jumlah MA yang tertib administrasi : Jumlah MA	18,75%	25,00%	31,25%	43,75%	56,25%	68,75%
		Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi	Jumlah SMK yang tertib administrasi : Jumlah SMK	54,55%	59,60%	64,65%	69,70%	73,74%	83,84%
VI	Program Pendidikan Kesetaraan	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	(Jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket A yang lulus / Jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket A) x 100%	68,93%	70,00%	71,07%	72,14%	73,21%	74,29%
		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	(Jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket B yang lulus / Jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket B) x 100%	87,74%	88,12%	88,51%	88,89%	89,27%	89,66%
		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	(Jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket C yang lulus / Jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket C) x 100%	90,72%	90,85%	90,98%	91,11%	91,24%	91,37%
VII	Program Pendidikan Masyarakat	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang	(Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	5,34%	5,53%	5,73%	5,93%	6,13%	6,32%

No.	Tujuan, Sasaran, Program	Indikator	Formulasi Indikator	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	mendaftar proses akreditasi	/ Jumlah kursus dan pelatihan) x 100%						
		Tingkat cakupan anak didik yang mengikuti pendidikan masyarakat tiap minggu	Jumlah ambang batas anak didik x Jumlah guru	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan untuk periode 5 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RPJMD Kota Surabaya, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2010-2015.

Dokumen rencana strategis menjadi acuan untuk menjalankan Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan target perubahan. Dalam evaluasi selama lima tahun, rencana strategis Dinas Pendidikan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan,

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini Dinas Pendidikan akan lebih menerapkan strategi untuk memprioritaskan aspek pembangunan pendidikan ke arah peningkatan kualitas sarana prasarana, pengembangan kurikulum, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan prestasi, peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan, pendidikan kesetaraan, pendidikan masyarakat dan LKP, pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan, serta pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Surabaya, 16 September 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya



Dr. Ikhsan, S. Psi. MM
Pembina Utama Muda

NIP.19690809 199501 1 002



DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Jagir Wonokromo No. 354 - 356

Telp. 031-8411613, 8499515

E-mail : dispendiksby@gmail.com

Visit Us : dispendik.surabaya.go.id

